



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 13 Desember 2016

Halaman: 4

KURANG BUKTI, PELANGGARAN TAK DITINDAKLANJUTI

Panwas: Tempat Ibadah Steril dari Kampanye

YOGYA (MERAPI) - Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Yogyakarta mewaspadaai kampanye di tempat ibadah. Pasalnya ada laporan indikasi kampanye yang dilakukan di masjid. Para pasangan calon (paslon) diimbau agar tidak melakukan kampanye di tempat ibadah karena termasuk tempat terlarang untuk berkampanye.

"Sudah ada (indikasinya) dan informasinya sudah sampai Panwas. Kita juga mengimbau paslon agar tidak kampanye di tempat ibadah," kata Ketua Panwas Pilkada Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin, Senin (12/12).

Dia menjelaskan Panwas menerima laporan indikasi kampanye di tempat ibadah yakni masjid. Namun laporan itu belum ditindak lebih lanjut karena kurang bukti. Dia juga belum dapat

menyampaikan indikasi kampanye di masjid itu dilakukan di wilayah mana. Meski demikian laporan itu tetap dikaji dan pelapor harus melengkapi bukti-bukti indikasi kampanye di tempat ibadah itu.

"Tidak ada rekaman dan foto saat dilaksanakan. Informasinya itu dilakukan di pagi hari di masjid. Kita harus berpegang teguh pada aturan dasar hukum. Kalau tidak ada bukti dan saksi itu fitnah namanya," pa-

parnya.

Walaupun indikasi kampanye itu tidak cukup bukti, tapi hal itu menjadi kewaspadaan Panwas Kota Yogyakarta. Untuk mengantisipasinya Panwas akan mengumpulkan partai politik, organisasi masyarakat dan dewan masjid Kota Yogyakarta dalam waktu dekat.

"Mereka akan kami kumpulkan untuk edukasi terkait kampanye dan diimbau tidak menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Tempat ibadah ini tidak hanya masjid, bisa gereja, pura, wihara dan lainnya," terang Agus.

Dia menyampaikan ancaman sanksi jika kampanye terbukti dilakukan di tempat ibadah berupa administrasi. Hal itu karena sesuai per-

aturan KPU, kampanye di tempat ibadah, termasuk tempat kampanye yang dilarang.

Untuk indikasi pelanggaran lain seperti politik uang, pihaknya belum menerima laporan terkait hal tersebut. Namun politik uang tetap menjadi pencerminan Panwas karena berpotensi terjadi dan bisa tidak dalam bentuk uang.

"Belum ada laporan, tapi kita tetap cermati itu. Mungkin tidak *money politic*, tapi dalam bentuk lain," imbuhnya.

Selama ini Panwas banyak menangani terkait pelanggaran ala peraga kampanye. Selain itu pelanggaran terkait netralitas oknum polisi yang terlibat dalam acara kampanye salah satu paslon Pilkada Yogyakarta. (Tri-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005